

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Achmad Tjahjono, Fakhri Husein Muh, Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Pertama, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001.
- Agoes, Sukrisno, 2010, Akuntansi Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2002, Sistem Akuntansi Pemerintah Lemah Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nugraha, Haryadi. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada BadanLingkungan Hidup Provinsi Riau. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Riau.
- Ulum, Ihyaul, MD, 2004, Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik (Suatu Pengantar). Jakarta: Erlangga.
- Hafiz, Abdul. 2007, Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Mulyadi, 2001, Sistem akuntansi, Cetakan Ketiga, Yayasan Pusaka Nusantara, Yogyakarta.
- Tanjung Hafiz, Abdul. 2007, Akuntansi Pemerintah Daerah, Bandung.
- Rudianto, 2009, Pengantar Akuntansi Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Wahyono, Teguh. 2004, Sistem Informasi Akuntansi. Analisis , Desain dan Pemograman Komputer. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Yani, Ahmed. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta Rajawali Pers
- Suardjono. 2005. Teori Akuntansi. Perekayasa Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.

Dokumen dan Literatur Penunjang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah

